

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Profil PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

###### **a. Sejarah PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan di atas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian di relokasi ke Kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Momerandum of Understanding* (MOU) dan surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BM/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta

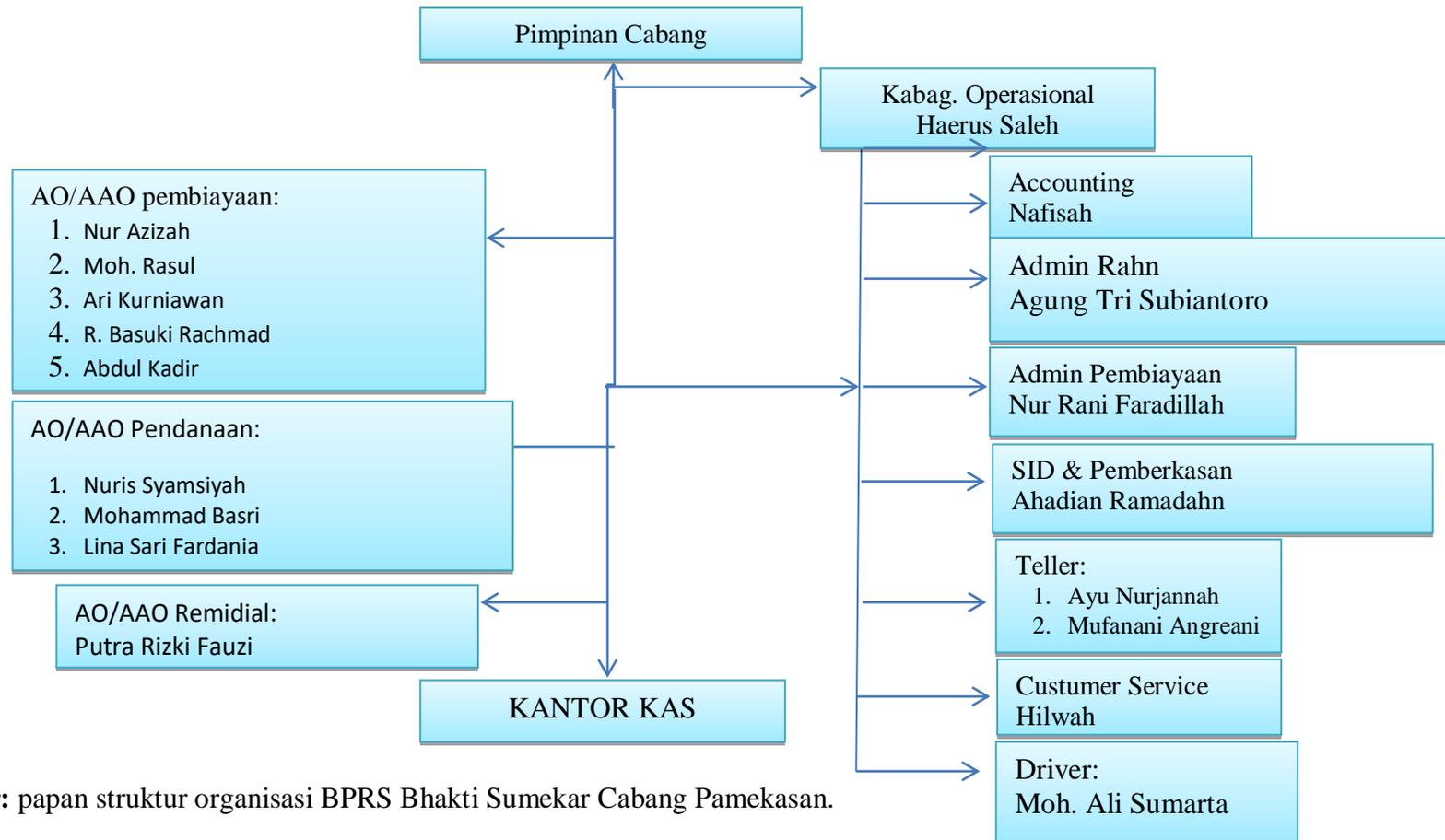
bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/latar-belakang>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020.

**b. Struktur Organisasi PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.**

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**



**Sumber:** papan struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

## Keterangan

### 1) Pimpinan Cabang

Tugas dan fungsinya adalah

- a) Mengendalikan seluruh sistem operasional perusahaan
- b) Menentukan arah kebijakan perusahaan cabang
- c) Melakukan pembinaan kepada karyawan

### 2) Kabag Operasional

Tugas dan fungsinya adalah

- a) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan.
- b) Membantu tugas-tugas pimpinan cabang.
- c) Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan SOP (standar operasional perusahaan)

### 3) *Accounting*

Tugas dan fungsinya

- a) Mengatur sirkulasi keuangan perusahaan
- b) Memenuhi kebutuhan keuangan dan operasional perusahaan
- c) Melakukan pengawasan keuangan seluruh bagian
- d) Mengendalikan sistem kepegawaian melaksanakan pengecekan terhadap karyawan

### 4) Admin Pembiayaan

Tugas dan fungsinya

- a) Melaksanakan dan mengendalikan sistem operasional pembiayaan
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pembiayaan.
- c) Melakukan pelaporan akuntansi terhadap pihak terkait

5) Admin *Rahn*

Tugas dan fungsinya

- a) Melayani nasabah untuk transaksi gadai dan penebusan barang gadai sesuai dengan aturan yang diterapkan
- b) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi yang diproses berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan aturan yang telah ditetapkan

6) *Teller*

Tugas dan fungsinya

- a) Membantu melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*

7) *Custemer Service*

Tugas dan fungsinya

- a) Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah atau tamu dengan baik dan secara islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas
- b) Memberikan pelayanan kepada nasabah melalui *call center* atau tatap muka langsung

8) AO/AAO Pembiayaan

Tugas dan fungsinya

- a) Melakukan penilaian terhadap calon nasabah
- b) Melakukan survey lapangan ketempat calon nasabah
- c) Melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran.

9) AO/AAO Pendanaan

Tugas dan fungsinya

- a) Mengatur sistem pemasaran produk bank

- b) Melaksanakan pengawasan pemasaran di lapangan

### **c. Visi dan Misi**

Adapun Visi PT.BPRS Bhakti Sumekar yaitu: “Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dn budaya”.

Adapun Misinya adalah Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah.Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.Serta mengupayakan peningkatan pendapatan asli Daerah.<sup>2</sup>

### **d. Produk dan Layanan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

#### **1) Produk Pendanaan**

- a) Tabungan Barokah
- b) Tabungan Siswa
- c) Tabungan Qurban
- d) Tabungan Haji
- e) Tabungan Umrah
- f) Tabungan Simpel iB
- g) Deposito Mudharabah

#### **2) Produk Pembiayaan**

- a) Pembiayaan Serba Guna
- b) Pembiayaan Sepeda Motor & Polygon
- c) Pembiayaan Modal Kerja UMKM
- d) Pembiayaan Talangan Haji/Umrah

---

<sup>2</sup>Ibid.

- e) Pembiayaan Rahn-Emas
- f) Pembiayaan Pensiunan
- g) Pembiayaan Sanitasi
- h) Pembiayaan Elektronik
- i) Pembiayaan Pusyar iB
- j) Pembiayaan KPR
- k) Pembiayaan Kepemilikan Emas
- l) Pembiayaan Investasi

### **3) Produk Layanan**

- a) Jasa Kiriman Uang
- b) Pembayaran Gaji/Insentif Bagi PNS/Karyawan Swasta/Guru

Dari beberapa produk pembiayaan di atas dalam setiap pembiayaan pasti selalu ada yang namanya risiko diantaranya seperti Pembiayaan serba guna, pembiayaan kendaraan, pembiayaan UMKM pembiayaan talangan haji/umroh, pembiayaan emas, pembiayaan pensiunan, pembiayaan sanitasi, pembiayaan elektronik, pembiayaan pusyar IB, pembiayaan KPR, pembiayaan kepemilikan emas, dan pembiayaan investasi.<sup>3</sup> Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap presentase pembiayaan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

## **B. Paparan Data**

### **1. Prosedur Pemberian Pembiayaan PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan langkah awal yang dilakukan PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan ketika nasabah mengajukan

---

<sup>3</sup>Ibid.

pembiayaan sebagaimana yang dijelaskan bapak Ahadian Ramadhan sebagai Administrasi Pembiayaan:

“pertama itu mbak, nasabah datang mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian nasabah diminta melengkapi sertifikat yang diperlukan contohnya KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah berkeluarga, dan jaminan entah itu BPKP atau sertifikat. Setelah itu, kita melakukan register (pemetaan) setelah register diinput dalam sistem baru berkas tersebut diserahkan ke marketing untuk dianalisis apakah layak atau tidak memperoleh pembiayaan disini. Kalau tidak ada kendala maka proses itu berlanjut untuk dilakukan komite atau persetujuan dari pimpinan dan biasanya nanti ada pengkoreksian, banyak hal yang harus dikoreksi setelah pimpinan ACC baru berkas pengajuan tersebut diserahkan ke saya dan saya yang memproses untuk pencairan, kurang lebihnya seperti itu mbak”.<sup>4</sup>

Sedangkan langkah-langkah awal yang dilakukan PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam meminimalisir risiko ketika nasabah mengajukan pembiayaan yaitu dengan mengidentifikasi nasabah menggunakan prinsip 5C meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.

#### **a. Character (watak)**

Menggambarkan watak dan keperibadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.<sup>5</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Putra Rizki Fauzi sebagai AO Remedial:

“dalam menerima nasabah baru disini tidak serta merta langsung menerima mbak, kami sebagai *account officer* yang bertugas menganalisis nasabah harus mempertimbangkan dulu apakah nasabah ini layak atau tidak memperoleh pembiayaan, terutama aspek *character* atau watak dalam hal ini saya sebagai *account officer* menganalisa data calon nasabah menggunakan data nasabah yang diperoleh dari SLIK (sistem informasi layanan keuangan) sehingga kejujuran dari calon nasabah akan dilihat dari kesesuaian jawaban yang diberikan dengan data yang ada di SLIK, sedangkan bagi yang sudah berkeluarga itu mbak harus dihadiri oleh suami istri

---

<sup>4</sup>Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

<sup>5</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 120

yang mengajukan pembiayaan hal ini untuk menghindari *character* yang tidak baik dari salah satu pihak.”<sup>6</sup>

### **b. Capacity**

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.<sup>7</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Abd. Kadir sebagai AO Lending:

“dalam hal melihat *capacity* pihak BPRS ini mbak mensurvei langsung ketempat usaha calon nasabah dan membuat laporan keuangan dari usaha yang dimiliki calon nasabah dalam mengelola dan menghasilkan laba dari usaha yang dimilikinya, dan untuk nasabah yang menjadi PNS kami memeriksa slip gaji nya”<sup>8</sup>

### **c. Capital**

Modal merupakan jumlah yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Abd. Kadir sebagai AO Lending:

“untuk analisis *capital* kami pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam melihat aspek ini adalah dengan melihat rumah calon debitur itu sendiri apakah kepemilikan rumah tersebut jelas dan benar rumahnya sendiri atau hanya rumah sewa yang ditinggalinya sementara begitupun dengan aset-aset lain yang dimilikinya. Dan dilihat dari uang muka, semakin besar uang muka (modal) yang disertakan pada usahanya akan semakin meyakinkan kami dalam memberikan pembiayaan tersebut”.<sup>10</sup>

### **d. Collateral**

---

<sup>6</sup>Putra Rizki Fauzi, AO remedial, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

<sup>7</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 121

<sup>8</sup>Abd. Kadir, AO lending, Wawancara Langsung, (12 Mei 2020)

<sup>9</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 123

<sup>10</sup>Abd. Kadir, AO lending, Wawancara Langsung, (12 Mei 2020)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Abd. Kadir sebagai AO Lending:

“untuk analisis jaminan ini mbak, kita menganalisis apakah jaminan tersebut tercover apa tidak dengan pembiayaan yang diajukan, misal mengajukan 100 juta kalau jaminannya pas ya kita kasih bak tapi kita hanya bisa ngasih 80%nya mbak untuk jaga-jaga jika suatu saat nasabah tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya, agar pihak bprs tidak dirugikan bak kalau gak ngasih pas 100% dari taksasi jaminan”.<sup>12</sup>

#### e. *Condition of economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.<sup>13</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Haerus Saleh sebagai KABAG:

“untuk aspek kondisi ekonomi ini kami tidak begitu memperhatikan mbak, kami hanya menekankan pada *character* (watak), *capacity* (kemampuan calon nasabah), *capital* (modal) dan *collateral* (jaminan), karena menurut kami yang paling penting diterapkan yang empat itu mbak”.<sup>14</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Bhakti Sumekar sudah menerapkan prinsip 5C untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi, akan tetapi untuk kondisi ekonomi BPRS tidak begitu memperhatikan BPRS hanya menekankan pada *character* (watak), *capacity*, *capital*, dan *collateral* karena menurut BPRS Bhakti Sumekar

---

<sup>11</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 124

<sup>12</sup>Abd. Kadir, AO lending, Wawancara Langsung, (12 Mei 2020)

<sup>13</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 125

<sup>14</sup>Haerus Saleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

Cabang Pamekasan yang paling penting diterapkan hanya *character, capacity, capital*, dan *collateral*.

## 2. Risiko Pembiayaan di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan dilapangan mengenai risiko pembiayaan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, baik dengan wawancara dan dokumentasi maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Risiko murni (pure risk). Risiko murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko yaitu, risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko legal.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, risiko murni yang pernah terjadi pada pembiayaan adalah risiko aset fisik, dan risiko karyawan.

- 1) Risiko aset fisik merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dll.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Abdul Kadir sebagai AO lending:

“setiap pembiayaan disini itu kan wajib memberikan jaminan mbak baik dalam bentuk Sertifikat Tanah Rumah, BPKB Mobil/Kendaraan Bermotor, Emas ataupun Bilyet Deposito. Untuk risiko aset fisik itu kan, kan biasanya jaminannya itu berupa BPKB, kalau jaminan fisiknya itu kan berupa sepeda motor atau mobil. Pernah terjadi disini kan jaminan fisiknya itu dijual sama nasabahnya, tetapi langkah pertama kita akan melaporkan pada pihak kepolisian kan karena itu sama dengan penggelapan. Karena nasabahnya takut berurusan dengan hukum kan, ya akhirnya dilunasi langsung mbak”.<sup>15</sup>

Penuturan mengenai risiko aset fisik juga diungkapkan oleh bapak Putra Rizki Fauzi sebagai AO remedial.

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir, AO lending, Wawancara Langsung (12 Mei 2020)

“risiko aset fisik di BPRS ini bisa disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan jaminan sehingga akan merugikan pihak BPRS, tapi hal ini seperti sangat jarang sekali terjadi karena penjagaan untuk aset fisik memang sangat diperhatikan dan sudah memiliki tempat khusus”.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar wajib memberikan jaminan baik dalam bentuk Sertifikat Tanah Rumah, BPKB Mobil/Kendaraan Bermotor, Emas ataupun Bilyet Deposito sebagai aset fisik atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah dari BPRS Bhakti Sumekar. Dan mengenai risiko aset fisik di BPRS Bhakti Sumekar untuk yang menggunakan jaminan BPKB pernah terjadi penggelapan yaitu nasabah menjual jaminan fisiknya yang berupa sepeda motor tetapi pihak BPRS melaporkan kepada pihak kepolisian dan nasabah tersebut langsung melunasi angsurannya. Dan untuk risiko aset fisik yang jaminannya ada di BPRS Bhakti Sumekar yang disebabkan oleh kehilangan atau kerusakan pada jaminan itu jarang sekali terjadi karena sudah memiliki tempat penyimpanan khusus yang terjamin keamanannya.

2) Risiko karyawan merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan/organisasi tersebut. Contohnya kejelekan kerja sehingga aktivitas perusahaan terganggu.

Selain itu tidak dapat dipungkiri setiap pembiayaan pasti terdapat risiko karyawan. Risiko karyawan merupakan risiko yang disebabkan oleh karyawan yang bekerja diperusahaan atau organisasi tersebut. Mengenai risiko karyawan di BPRS Bhakti Sumekar berikut dijelaskan oleh bapak Haerus Saleh sebagai KABAG operasional:

“kalau untuk risiko yang semacam (salah analisis data) itu mbak kita lebih menekankan kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dalam menganalisis dan menginput data agar tidak terjadi kesalahan analisis dan input data yang dapat mendatangkan risiko kerugian kepada bank dan nasabah. Karena bagaimanapun itu juga merupakan tanggung jawab dari setiap karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan teliti. Dan untuk masalah karyawan sakit itu bisa langsung diganti

---

<sup>16</sup>Putra Rizki Fauzi, AO remedial, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

oleh petugas lain yang mengetahuinya. Karena karyawan disini semuanya dituntut untuk bisa bak”<sup>17</sup>

Penuturan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh bapak Ahadian Ramadhan sebagai Administrasi Pembiayaan:

“untuk risiko karyawan ini pasti ada bak, seperti kesalahan karyawan dalam menginput data tapi kami juga berkompeten. Setiap karyawan disini itu nanti pasti diikutkan pelatihan analisa agar SDMnya itu profesional. Semisal ada karyawan yang lagi sakit pasti ada penggantinya bak”<sup>18</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa risiko karyawan ini memang tidak dapat dihindari karena setiap manusia memang pasti salah ataupun sakit begitu juga dengan karyawan di BPRS.

Sedangkan dari hasil observasi (pengamatan) risiko ini saya lihat ketika salah seorang karyawan BPRS sakit maka ada pekerjaan yang kurang terhendel dengan baik. Contoh yang saya amati, ketika ada seorang nasabah yang ingin mencairkan pembiayaan UMKMyang diterima kepada salah satu karyawan, akan tetapi sedikit terkendala karena karyawan yang memproses pembiayaan yang diajukan tersebut sedang izin ada kepentingan sehingga harus menunggu beberapa saat terlebih dahulu untuk mencairkan pembiayaan nasabah tersebut. Dan untuk hal seperti ini BPRS Bhakti Sumekar sudah menerapkan manajemen tersendiri supaya risiko karyawan ini tidak mengganggu aktivitas perbankan.

- b. Risiko spekulatif (speculative risk). Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, risiko spekulatif yang pernah terjadi pada pembiayaan adalah risiko pasar dan risiko kredit.

---

<sup>17</sup>Haerus Saleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

<sup>18</sup>Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

1) Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga dipasar.

Contohnya harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian.

Untuk risiko pasar yang biasa terjadi pada pembiayaan adalah risiko kenaikan harga barang dipasaran. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang berbasis *natural certainty contracts*. Berdasarkan hasil wawancara risiko pasar (risiko kenaikan harga barang dipasaran) sangat jarang sekali terjadi karena BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sudah bekerja sama dengan beberapa *supplier* sehingga sangat mudah untuk mengetahui pergerakan harga suatu barang dipasar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Haerus Saleh sebagai KABAG Operasional:

“untuk kenaikan harga dipasaran itu jarang sekali terjadi karena kami (pihak bank) akan terlebih dahulu melakukan survey harga dipasaran, setelah itu barulah kami akan menentukan harga kepada nasabah”<sup>19</sup>

Sedangkan penuturan yang disampaikan oleh bapak Abdul Kadir sebagai petugas AO lending adalah sebagai berikut:

“untuk kenaikan harga barang dipasaran itu jarang sekali terjadi mbak, karena sebelumnya kami akan melakukan survey lapangan mengenai harga dipasaran. Dan untuk pembiayaan yang bersifat UMKM kami melakukan monitoring sendiri sesuai dengan pesanan si nasabah seperti misalnya pembelian isi toko. Jadi kami akan bekerja sama dengan *supplier* untuk menyediakan barang yang diinginkan pihak nasabah”<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara diatas risiko pasar (perubahan harga dipasaran) ini jarang sekali terjadi karena harga untuk barang-barang yang akan diputuskan setelah BPRS melakukan survey terlebih dahulu kepada *supplier* mengenai harga barang yang diinginkan oleh nasabah. Setelah mengetahui harga dipasaran baru kemudian ditentukan harga dari barang tersebut pada saat akad dilaksanakan. Karena bank juga sudah bekerja sama dengan pihak *supplier* jadi sangat mudah untuk mengetahui pergerakan harga suatu barang dipasaran.

---

<sup>19</sup>Haerus Shaleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

<sup>20</sup>Abdul Kadir, AO lending, Wawancara Langsung, (12 Mei 2020)

2) Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara risiko kredit sampai saat ini masih terkelola dengan baik oleh pihak bank sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Putra Rizki Fauzi sebagai AO remedial:

“Risiko kredit ini bisa terjadi dengan adanya dua faktor: 1) faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh karyawan dalam menganalisa pembiayaan-pembiayaan yang diberikan. Faktor internal yang kedua yaitu apabila ada permainan antara pihak karyawan dan pihak nasabah. 2) faktor eksternal, yaitu memang disebabkan karena ketidakmampuan pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya seperti mengalami musibah. Walaupun sampai saat ini risiko kredit dari pembiayaan di BPRS masih bisa tertangani dengan baik oleh pihak bank”.<sup>21</sup>

Sedangkan penuturan yang disampaikan oleh Bapak Haerus Shaleh sebagai KABAG Operasional adalah sebagai berikut:

“risiko kredit ini merupakan risiko yang paling sering terjadi karena didalam semua pembiayaan. Pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan UMKM akan tetapi pembiayaan UMKM memiliki resiko yang cukup besar dibandingkan dengan risiko lainnya. Adapun pembiayaan yang lebih sedikit risikonya adalah pembiayaan PNS potong gaji karena angsuran yang diambil tiap bulannya itu terpotong dari gaji pokoknya sehingga nasabah yang menerima pembiayaan ini cukup sedikit karena potensi yang dimiliki nasabah ini cukup sedikit”.<sup>22</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang paling sering terjadi dibandingkan dengan risiko yang lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sehingga semakin banyak pula risiko kredit didalamnya. Risiko kredit di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan merupakan risiko yang diakibatkan tidak terbayarnya angsuran oleh nasabah terhadap bank.

---

<sup>21</sup>Putra Rizki Fauzi, AO remedial, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

<sup>22</sup>Haerus Shaleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

### **3. Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan yang dapat merugikan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, berikut beberapa manajemen risiko yang diterapkan terhadap risiko yang telah dipaparkan diatas.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, dapat diketahui mengenai risiko pada pembiayaan adalah risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko pasar, dan risiko kredit.

- a. Strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam meminimalisir risiko aset fisik. Sebagaimana penjelasan dari bapak Abd. Kadir sebagai AO lending:

“Untuk meminimalisir risiko aset fisik yang terjadi pihak bank membuat suatu penyimpanan khusus yang dibuat seaman mungkin agar terhindar dari risiko kerusakan dan kehilangan, dipasangnya cctv di beberapa bagian, ditugaskan untuk beberapa satpam untuk berjaga malam dan bukan sembarang orang yang bisa masuk keruangan tersebut, dan jika risiko aset fisik seperti mobil atau kendaraan bermotor yang pemanfaatannya ada pada nasabah, pihak BPRS Bhakti Sumekar sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian jadi jika mengalami risiko terjualnya jaminan oleh nasabah atau bisa disebut penggelapan kami langsung melaporkan kepada pihak kepolisian”.<sup>23</sup>

Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapak Haerus Shaleh sebagai KABAG Operasional:

“Untuk aset fisik disini memiliki penyimpanan khusus, diletakkan cctv di beberapa sudut ruangnya, anti air dan api jadi masih aman ketika terjadi kebakaran. Jadi saya rasa amanlah bak untuk risiko kehilangan dan kerusakan”.<sup>24</sup>

Setelah melihat pernyataan diatas dan peneliti sesuaikan dengan apa yang peneliti amati dilapangan pernyataan tersebut memang sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan karena tempat yang disediakan untuk penyimpanan jaminan tersebut memang sangat tertutup

---

<sup>23</sup>Abdul Kadir, AO lending, Wawancara Langsung, (12 Mei 2020)

<sup>24</sup>Haerus Shaleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

dan tidak sembarang orang dapat memasukinya. Dan apabila ada keperluan untuk mengambil jaminan yang dijaminan oleh nasabah itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan cabang. Peneliti pernah melihat suatu kejadian mengenai keamanan penjagaan aset fisik ini hal itu terjadi pada tgl. 06 Mei 2020. Berikut peristiwa yang peneliti amati.

“tepat jam 10:30 seorang nasabah menghampiri admin pembiayaan. Nasabah A mengutarakan keinginannya untuk meminjam aset jaminan yang ada di BPRS yang kebetulan jaminan tersebut adalah BPKB sepeda. Nasabah A mengatakan jika ingin meminjam BPKB hanya untuk kepentingan perpanjangan BPKB saja karena waktu perpanjangannya akan berakhir besok. Dan admin pembiayaan pun melakukan proses yang sangat panjang, dimulai dari meminta izin kepada bagian legal, setelah itu kepada KABAG operasional, dan kemudian diminta langsung untuk izin kepada pimpinan cabang, setelah proses perizinan dilewati akhirnya demi keamanan aset fisik BPRS Bhakti Sumekar meminta nasabah A untuk kembali keesokan harinya karena akan sangat berisiko apabila jaminan ada ditangan nasabah dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi risiko aset fisik strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar adalah menghindari risiko dari kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh pencurian, kebakaran dan banjir dengan memilih lokasi aman dari banjir, menjamin keamanan terhadap aset atau agunan nasabah dengan semaksimal mungkin, menyiapkan tempat penyimpanan di brankas tahan api dan air, tidak semua orang bisa membuka brankas, cctv dibeberapa bagian, ditugaskan beberapa satpam untuk berjaga malam. Dalam risiko aset fisik pada mobil/kendaraan bermotor yang tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (nasabah) BPRS Bhakti Sumekar telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk berjaga-jaga jika ada risiko penggelapan.

- b. Dalam hal meminimalisir terjadinya risiko karyawan, khususnya dalam risiko salah analisis kredit atau salah input data, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan melakukan analisis data nasabah menggunakan data SID/SLIK. Sehingga nasabah tidak akan membohongi pihak *account officer* pada saat melakukan survey di lapangan.

Berikut apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir sebagai petugas *Account Officer*.

“untuk meminimalisir risiko tersebut kita lebih menekankan kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dalam menganalisis dan menginput data agar tidak terjadi kesalahan analisis dan input data yang dapat mendatangkan risiko kerugian, saya sebagai pihak bank menganalisa pembiayaan murabahah yang diajukan nasabah menggunakan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diberikan oleh pihak IT BPRS Bhakti Sumekar. Jadi kalau sudah menggunakan data itu nasabah tidak bisa bohong lagi soalnya datanya sudah valid, dari data pinjaman dibank lain, tunggakan angsuran dibank lain, seberapa besar jumlah pinjaman dan berapa kali melakukan tunggakan, lengkap dengan berapa hari dalam setiap bulannya telat dalam membayar angsuran itu sudah ketahuan bak dari data SLIK”.<sup>25</sup>

Penuturan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Bapak Haerus Shaleh sebagai KABAG operasional:

“Untuk menganalisa data nasabah agar mencegah terjadinya salah analisa kredit setiap karyawan menganalisanya dengan menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Yang mana data SLIK ini sudah terjamin kebenarannya karena program ini diberikan oleh OJK dan berada didalam wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan setiap karyawan disini itu nanti pasti diikutkan pelatihan analisa agar SDMnya itu profesional. dan untuk karyawan yang sakit itu langsung diganti bak, rata-rata karyawan disini pasti bisa kok. Karena karyawan disini itu semuanya dituntut untuk tau”.<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara diatas untuk manajemen risiko karyawan di BPRS Bhakti Sumekar adalah dengan cara menggantikan karyawan yang lagi sakit atau tidak masuk dengan alasan tertentu. Contoh kejadian yang peneliti amati dilapangan. Admin pembiayaan (Ahadian Ramadhan) sedang tidak masuk karena ada kepentingan, dan pada saat itu tugasnya langsung digantikan oleh SID dan pemberkasan (Nur Rani Faradillah).

Sedangkan untuk meminimalisir terjadinya risiko karyawan dalam hal menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan BPRS memiliki SOP tersendiri sehingga orang yang melakukan analisa bukan hanya satu orang dalam bidang tertentu saja akan tetapi ada

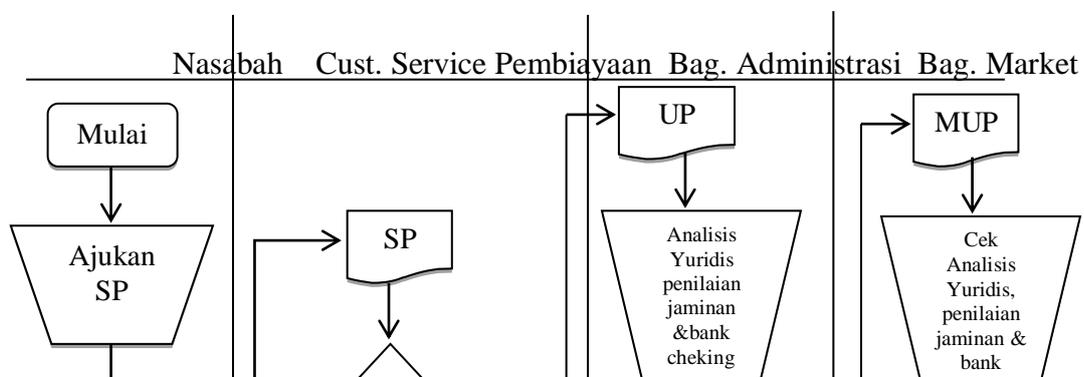
---

<sup>25</sup>Abdul Kadir, AO Pembiayaan, Wawancara Langsung, (12 Mei 2020)

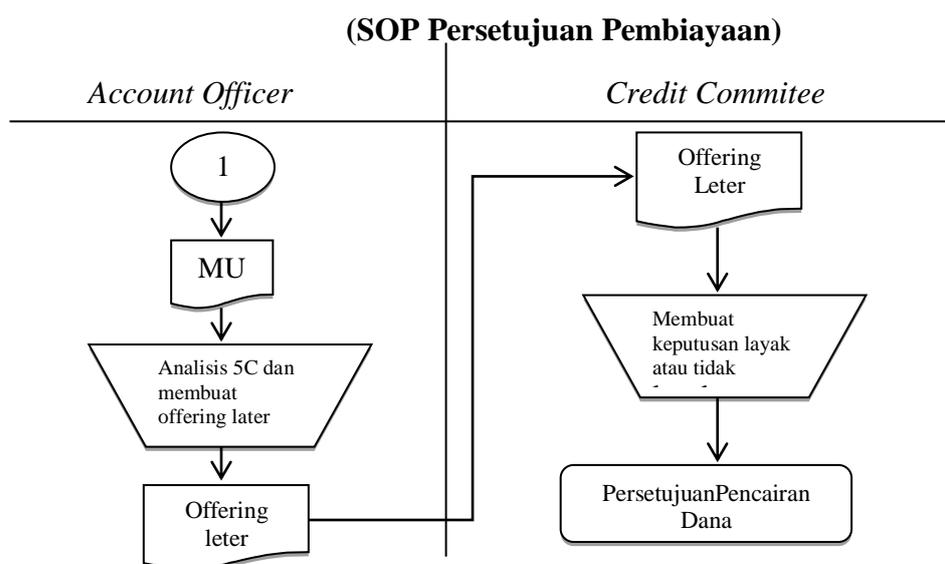
<sup>26</sup>Haerus Shaleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

tahapan yang harus dilalui sehingga ini sangat meminimalisir terjadinya kesalahan analisis data nasabah.

**Gambar 4.2**  
**SOP Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**  
**(SOP Pengajuan Pembiayaan)**



**Sumber:** SOP pengajuan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan



**Sumber:** SOP persetujuan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan

### **Keterangan SOP Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar**

1. Calon nasabah mengajukan surat permohonan yang akan diserahkan kepada CS Pembiayaan.

2. Setelah surat permohonan (SP) diberikan kepada CS Pembiayaan dan jika disetujui oleh CS Pembiayaan maka akan diterbitkan Usulan Pembiayaan (UP). Kemudian UP diserahkan kepada bagian administrasi.
3. Bagian administrasi akan melakukan Analisis Yuridis, penilaian jaminan, dan bank *cheking*. Jika UP disetujui maka akan diarsip dan diterbitkan Memorendum Usulan Pembiayaan (MUP).
4. MUP akan diserahkan kepada bagian Marketing.
5. Bagian Marketing akan menganalisis ulang aspek yuridis, penilaian jaminan dan bank *cheking* serta memberikan nomer register pada MUP.
6. Setelah MUP diterbitkan oleh bagian Marketing maka diserahkan ke bagian *Account Officer* (AO) untuk analisis 5C dan membuat *Offering Leter*.
7. Jika sudah disetujui maka *Offering Leter* akan diserahkan oleh bagian AO ke bagian *Credit Committee* untuk dilakukan penandatanganan surat untuk pencairan dana.

Dapat disimpulkan bahwasanya untuk meminimalisir risiko karyawan dalam kesalahan analisa pembiayaan, pihak bank melakukan analisa menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang mana data nasabah tersebut sudah terjamin kebenarannya. Dan analisa setiap pembiayaan dilakukan beberapa kali sesuai dengan SOP Pembiayaan untuk menghindari kesalahan analisis data. Dan untuk risiko karyawan yang sakit itu bisa langsung diganti oleh karyawan lain yang mengetahui bidang tersebut.

- a. Dalam hal efektivitas risiko pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan melakukan beberapa langkah untuk menangani risiko agar ter atasi secepat mungkin.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abd. Kadir sebagai AO lending:

“untuk mengatasi risiko yang terjadi agar risiko tersebut segera di atasi yaitu dengan melihat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan seperti halnya kami sebagai pihak yang bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan mempercepat mengatasi masalah yang ada seperti halnya mendiskusikan jalan keluarnya seperti apa dan solusi yang baik untuk kedua belak pihak bagaimana jadi kami itu tidak langsung memutuskan akan tetapi kami memusyawarahkan kepada

nasabah yang bersangkutan dan apabila dari hal tersebut mendapatkan jalan keluarnya iya maka akan di putuskan seperti itu tetapi ada juga nasabah yang sudah di peringati diberi jalan keluar yang baik masih saja tidak bisa bekerja sama maka kami mengatasi permasalahan tersebut dengan cara kami dan prosedur yang berlaku di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Untuk penanganan yang pihak bank lakukan untuk mengatasi risiko agar efektif kami segera melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut seperti contohnya iya mbak dulu ada nasabah kami yang melakukan kredit macet dalam pembiayaan menunggak angsurannya tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan sesuai jangka waktu tapi kami tidak langsung memutuskan pihak bank mencari tau apa faktornya sehingga nasabah ini tidak mampu setelah kami cari tau dan musyawarakan dengan pihak yang bersangkutan pihak kami tau apa masalahnya kendalanya seperti apa.<sup>27</sup>

Bapak Haerus Saleh juga menambahkan mengenai hal ini:

“untuk memperkecil adanya risiko yang dilakukan nasabah dan cara mengatasinya agar bejalan efektif kami terlebih dahulu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan nasabah tersebut bermasalah dan tidak bisa melunasi angsurannya sehingga pihak bank melakukan manajemen risiko sesuai prosedur yang berlaku dan sejauh ini pihak bank dalam menangani masalah selalu mengatasi tersebut segera mungkin dan penanganannya selalu efektif”.<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara diatas dalam efektivitas risiko pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan berkontribusi dengan beberapa pihak seperti kepolisian dan pihak yang bersangkutan yaitu nasabah dan saksi-saksi yang pada saat melakukan pembiayaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko untuk memperkecil risiko dan cara penanganan risiko agar efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Seperti hal yang disampaikan bapak Haerus Saleh yaitu Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Jadi tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir, AO Pembiayaan, Wawancara Langsung, (12 Mei 2020)

<sup>28</sup> Haerus Shaleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020)

“ jadi mbak ketika terjadi permasalahan atau risiko yang terjadi akibat penunggakan angsuran ataupun kredit macet pihak bank tidak langsung memutuskan hal itu dengan tidak mempertimbangkan atau mengevaluasi masalah tersebut namun pihak bank memberikan solusi bagi masalah-masalah tersebut namun jika solusi yang pihak bank berikan tidak juga ditanggapi maka kami dari pihak bank mengambil keputusan sesuai prosedur kami agar risiko tersebut dapat teratasi. Jadi pihak bank cukup efektif dalam menghadapi masalah tersebut sejauh ini”<sup>29</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh bapak Putra Rizki Fauzi sebagai AO remedial:

“ iya mbak disini untuk penanganan pembiayaan bermasalah tidak langsung memutuskan dari satu pihak melainkan pihak bank juga mendengar keluhan nasabah maunya seperti apa gitu jadi pihak kami juga melakukan pendekatan kepada nasabah dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta sumber yang dapat kami percaya”<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap organisasi dalam mengatasi masalah/risiko memiliki cara sendiri dalam penanganannya agar tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan dalam hal ini perlu adanya pendekatan proses, pendekatan sumber, pendekatan sasaran maka tujuan yang ingin dicapai dapat diatasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sebuah organisasi.

Adapun keterangan dari nasabah pembiayaan yaitu ibu hamidatul Hasanah

“pekerjaan saya mbak ibu rumah tangga tapi memiliki usaha yaitu kedai (toko) saya menjual bahan-bahan pokok dirumah dan makanan ringan saya sudah 2x mengambil pembiayaan UMKM ini karena cocok dengan yang saya lakukan yaitu usaha saya melakukan mengambil pembiayaan ini dengan jangka waktu 3 tahun dengan jumlah pembiayaan 20 juta dan angsuran per bulan bak. Saya insaallah lancer mbak tiap bulannya. Sebelum saya dapat menerima pembiayaan saya harus melewati beberapa syarat dan prosedur bak seperti, usaha saya, wilayah tempat tinggal, izin usaha dan izin kepala desa serta penghasilan perbulan dan tahunan ktp suami istri dan juga saya diberi arahan dan penjelasan mengenai pembiayaan yang saya ambil ini. Setelah saya memenuhi semua kriteria saya mendapatkan dana untuk usaha bak.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara dengan nasabah dan juga diperkuat dari penjelasan bapak

Ahadian Ramadhan sebagai administrasi pembiayaan:

---

<sup>29</sup>Ibid ,wawancara langsung,(06 Mei 2020)

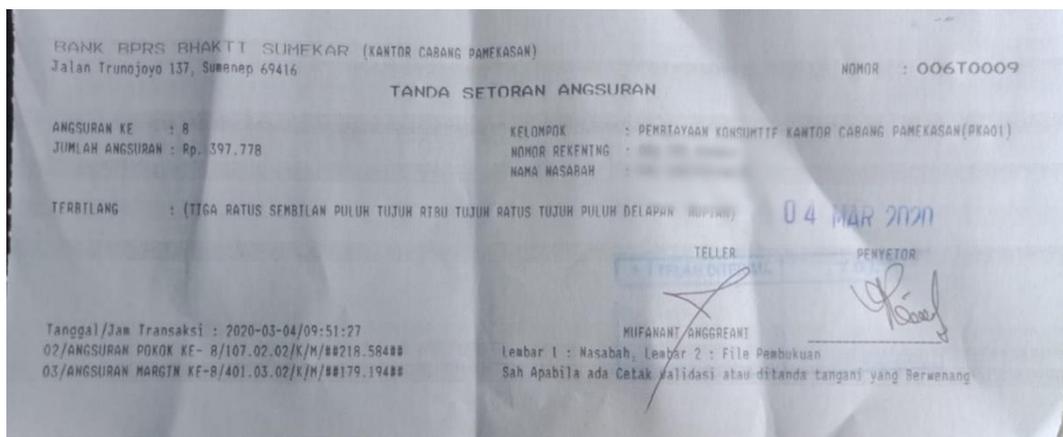
<sup>30</sup>Putra Rizki Fauzi, AO remedial, Wawancara Langsung (06 Mei 2020)

<sup>31</sup>Hamidatul Hasanah, pedagang (wawancara,12 Mei 2020)

“ sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank nasabah perlu memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti mengisi form pengajuan dan ketentuan lainnya seperti usahanya, jaminannya, pekerjaannya, alamat rumahnya, gaji perbulan dll seperti yang sudah mbak tau”<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan pembiayaan umkm itu perlu memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah agar pihak bank yaitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dapat meminimalisirkan risiko yang terjadi akibat kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya. Dan untuk menjaga agar nasabah tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak bank seperti membawa kabur dana yang diberikan bank.

**Gambar 4.3**  
**Bukti Pembayaran Angsuran dari BPRS Bhakti Sumekar**



#### **4. Upaya bank dalam menjaga likuiditas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Upaya menjaga likuiditas setiap unit bank BPRS agar tidak tersedak dalam penarikan dana yang besar adalah kewajiban konfirmasi nasabah kepada bank minimal satu hari sebelum penarikan guna menyiapkan dana tersebut. Jika fisik uang ada di kantor unit pun, nasabah harus tetap konfirmasi karena pihak bank juga berkewajiban konfirmasi kepada *Treasury*. Selain itu, aspek pembiayaan perlu diperhatikan, bank harus mampu mengelola

<sup>32</sup>Ahadian Ramadhan, Administrasi Pembiayaan, wawancara langsung (06 Mei 2020)

aset dengan baik, terutama aset yang kaitannya dengan pembiayaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Haerus Saleh sebagai KABAG Operasional:

“Upaya menjaga likuiditas setiap BPRS masing-masing agar tidak kaget dengan tarikan dana dalam jumlah besar, maka nasabah harus konfirmasi kepada bank guna menyiapkan dana tersebut. Bisa jadi fisiknya tidak tersedia. Pihak bank pun juga harus berkomunikasi dengan bagian Treasury kalau penarikannya dalam jumlah besar maupun kecil. Meskipun fisiknya ada di kantor unit, namun secara virtual tetap harus laporan kesana. Hal itu guna mengatur likuiditas unit bisnis secara nasional. Begitu juga dengan dropping, harus mendapat izin dari Treasury dulu. Itu kalau ditinjau dari penjagaan likuiditas terhadap kebutuhan mendesak. Kalau dari sisi pembiayaan ya dimaksimalkan pembayaran angsurannya, diusahakan jangan sampe bermasalah. Kalau bermasalah ya pokoknya harus ada pengembalian pembiyaan. Kan dana yang masuk bisa disalurkan kembali sebagai kas bisa digunakan juga untuk modal pembiayaan yang lain”<sup>33</sup>

## **5. Langkah-langkah BPRS dalam menangani penarikan dana dalam Jumlah Besar Baik Tabungan, atau Deposito, Sedangkan Likuiditas Belum Mencukupi, Apa yang Dilakukan Pihak BPRS**

Ketika likuiditas belum mencukupi saat terjadi kehausan dana *cash* oleh nasabah, maka yang dilakukan adalah meminjam dari unit cabang terdekat. Jika tidak ada terpaksa meminjam bank lain terdekat guna menghemat pengeluaran bank, seperti yang diungkapkan bapak Haerus Saleh sebagai KABAG Operasional berikut:

“Nah itu fungsinya laporan ke Treasury, kalau misalkan kita sedang minim dana kas kan langsung tahu unit mana yang kelebihan kas, bisa meminjam dulu dari unit cabang terdekat. Kalau mepet tidak ada ya kita terpaksa meminjam bank lain terdekat untuk menghemat pengeluaran. Kan kalau pinjam bank terdekat, dalam prosesnya penyerahannya asuransi kita yang menanggung. Selain itu kan kita punya secondary reserve, ya itu kan bisa dicairkan juga untuk mengatasi kesulitan kas.”<sup>34</sup>

## **6. Solusi dalam menjaga likuiditas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

---

<sup>33</sup>Haerus Saleh, KABAG Operasional, Wawancara Langsung, (06 Mei 2020).

<sup>34</sup>Ibid,

Penghambat utama dalam menjaga likuiditas adalah ketika tidak ada perputaran arus bisnis *funding* dan *lending*. Bank harus *manage* bagaimana arus likuiditas dalam bank, karena bank tidak bisa terus menyimpan dana deposan dalam bentuk kas. Oleh karenanya, bank harus ekspansi bisnis dalam bentuk pembiayaan. BankIndonesia (BI) mewajibkan setiap bank untuk menyimpan dananya di BI dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM). Seperti yang diungkapkan bapak Abd. Kadir sebagai AO Lending:

“Jika tidak ada perputaran bisnis *funding* dan *lending*, itu menghambat. Bank tidak bisa terus menerus menyimpan dana masyarakat dalam bentuk kas saja. Jadi bank harus lempar kas ke pembiayaan. Bank juga harus memperhatikan kas yang ada sebelum ekspansi bisnis pembiayaan. Hal ini bertujuan mengatur arus likuiditas bank. BI sendiri juga mewajibkan setiap bank untuk menyimpan dana kas di BI dalam Bentuk giro Wajib Minimum”.<sup>35</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan beberapa temuan-temuan, hasil temuan yang didapat dilaporkan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Risiko Pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Hasil temuan tentang risiko dalam pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu:

- a. Risiko kredit di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan merupakan risiko yang terjadi dikarenakan nasabah melakukan penunggakan dalam membayar angsuran.
- b. Risiko kredit pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan merupakan risiko yang paling sering terjadi dibandingkan dengan risiko lainnya. Hal tersebut dilihat dari semua jumlah pembiayaan dan pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan yang memiliki jumlah paling tinggi .

---

<sup>35</sup>Abd. Kadir, AO lending, wawancara langsung, (12 Mei 2020)

- c. Dalam menyalurkan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan meminta jaminan kepada nasabah untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari nasabah melakukan penunggakan pembayaran (kategori macet).
- d. Jaminan yang diberikan nasabah kepada BPRS Bhakti Sumekar berupa sertifikat tanah/rumah, BPKB Mobil/kendaraan bermotor, dan emas. Dan jaminan diberikan dengan menunjukkan bukti kepemilikan kepada petugas notaris yang ditunjuk oleh bank.
- e. Risiko aset fisik seperti mobil atau kendaraan bermotor yang pemanfaatannya ada pada nasabah, pihak BPRS Bhakti Sumekar sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan untuk risiko aset fisik seperti kehilangan atau kerusakan pada jaminan belum pernah terjadi. Karena BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sudah memiliki tempat penyimpanan khusus.
- f. Risiko karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan disebabkan oleh terjadinya kesalahan analisis data. Risiko ini pernah dialami oleh BPRS akan tetapi tidak sampai menyebabkan kerugian kepada bank. Karena karyawan yang melakukan analisis bukan hanya satu bagian saja.
- g. Risiko karyawan selanjutnya di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah apabila ada karyawan yang sakit atau tidak masuk dikarenakan ada kepentingan tertentu. Dan risiko ini pernah terjadi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

## **2. Upaya dalam Menjaga Likuiditas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Hasil temuan tentang upaya dalam menjaga likuiditas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu:

- a. Aspek pembiayaan perlu diperhatikan, bank harus mampu mengelola aset dengan baik, terutama aset yang kaitannya dengan pembiayaan

- b. Menjaga stabilitas cash in dan cash out bank
- c. Memastikan *funding* dan *lending*nya berjalan sesuai dengan yang diinginkan bank

#### **D. Pembahasan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>36</sup>

Fungsi utama dari perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta melayani jasa. Terkait apapun itu fungsi bank, sejatinya seluruh komponen aktifitas perbankan tersebut mengandung risiko tak terkecuali pembiayaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menunjukkan bahwa seluruh risiko-risiko dalam perbankan saling terkait, mereka akan terkait satu sama lain. Terkhusus risiko pembiayaan, pihak bank berusaha meminimalisir risiko-risiko dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan diterapkan bukan hanya untuk memagari risiko-risiko pembiayaan bermasalah, akan tetapi juga dilakukan untuk memagari perilaku karyawan dari penyelewengan, melindungi konsumen dan juga pihak bank sendiri.

Dari paparan data dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai tipe risiko dan manajemen risiko yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 105.

## **1. Risiko Pembiayaan di BPR Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Berdasarkan hasil paparan data dan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa risiko yang mungkin sekali terjadi (pernah terjadi) pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah risiko aset fisik, risiko karyawan, risiko pasar, dan risiko kredit.

### **a. Risiko Aset Fisik**

Risiko aset fisik pada pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan terjadi apabila ada kerusakan/kehilangan pada jaminan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah seperti sertifikat tanah/rumah, BPKB mobil/kendaraan bermotor, emas, bilyet deposito. Yang mana kehilangan atau kerusakan pada agunan yang dijamin oleh nasabah merupakan tanggung jawab pihak BPRS dalam hal penjagaan aset jaminan tersebut. Sampai saat ini untuk risiko ini seperti kehilangan atau kerusakan pada jaminan belum pernah terjadi di BPRS. Sedangkan untuk risiko aset fisik yang pemanfaatannya ada pada nasabah seperti mobil/kendaraan bermotor BPRS sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk berjaga-jaga apabila ada penggelapan aset fisik.

### **b. Risiko Karyawan**

Risiko karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan terjadi disebabkan adanya karyawan yang melakukan kesalahan analisis dan pembiayaan atau salah dalam menginput data nasabah ke dalam komputer. Selain itu risiko karyawan juga dapat terjadi apabila ada karyawan yang sakit sehingga karyawan tersebut tidak dapat memenuhi tugasnya di BPRS. Risiko seperti ini dapat mengganggu jalannya aktivitas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan.

### **c. Risiko Pasar**

Risiko pasar di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dalam hal pembiayaan terjadi disebabkan adanya kenaikan harga barang yang dipesan oleh nasabah setelah akad disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak BPRS dan pihak nasabah. Dan risiko pasar dalam pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan sampai saat ini belum pernah terjadi. Karena BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan telah menerapkan manajemen tersendiri untuk meminimalisir risiko pasar ini.

#### **d. Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan disebabkan oleh adanya nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu atau gagal bayar. Risiko kredit di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan merupakan risiko yang paling sering terjadi dibandingkan dengan risiko lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan: 1) faktor internal, yaitu faktor yang disebabkan oleh kesalahan karyawan (*account officer*) dalam menganalisa pembiayaan yang diberikan. Dan faktor internal kedua yaitu apabila ada permainan antara pihak karyawan dengan pihak nasabah. 2) faktor eksternal, yaitu sebuah faktor yang memang disebabkan karena ketidakmampuan pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya seperti mengalami musibah sakit, meninggal, bencana alam, kebakaran, dan musibah lainnya yang secara alamiah tidak pernah diinginkan untuk terjadi. Faktor ini juga disebabkan apabila nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan walaupun kondisi keuangannya berjalan dengan normal.

## **2. Upaya Dalam Menjaga Likuiditas di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan**

Secara umum, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (*cash*), sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas.<sup>37</sup>

Implementasinya dalam menjaga likuiditas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan adalah dengan mengatur lalu lintas penarikan nasabah dan pengeluaran perbankan. Untuk menjaga unit kantor tidak sampai kekurangan likuiditas, maka nasabah wajib melakukan konfirmasi pada bank minimal satu hari sebelum dilakukan penarikan. Penarikan yang dimaksud adalah penarikan dengan berjumlah besar. Begitu juga jika terjadi *dropping*, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, harus memiliki izin *Treasury*. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan dana tersebut. Meskipun fisik dana tersebut ada, namun bank berkewajiban melakukan konfirmasi ke *Treasury* yang merupakan *handling* untuk mengatur likuiditas secara nasional.

Selain itu, dalam meningkatkan likuiditas BPRS memaksimalkan pelunasan pembiayaan baik yang masih lancar maupun yang sudah bermasalah. Meskipun dalam menjaga likuiditas tidak hanya aspek pembiayaan yang perlu diperhatikan karena menjaga likuiditas berarti bank harus mampu mengelola aset dan liabilitas dengan baik. Hal ini ditekankan pada pengelolaan aset yang erat kaitannya dengan pembiayaan.

Suatu bank syariah dikatakan likuid apabila: a) Dapat memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dengan ketentuan yang berlaku, b) Dapat memelihara

---

<sup>37</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013)., hlm. 182.

Giro di Bank Koresponden, c) Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.<sup>38</sup>

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan melakukan pengelolaan likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dimiliki oleh bank. Untuk mengukur besarnya risiko likuiditas, bank menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pada tahun 2017 FDR yang dihasilkan sebesar 2% atau 0,02 dengan total pembiayaan Rp. 74,848 dan total DPK sebesar Rp. 73,341. Namun pada tahun 2018 FDR yang dihasilkan sebesar 1,75% atau 0,0175 dengan total pembiayaan Rp. 88,459 dan total DPK sebesar Rp. 50,443. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan menjaga FDR sebagai bentuk optimalisasi penyaluran pembiayaan dan antisipasi risiko likuiditas terhadap kondisi eksternal dan internal

---

<sup>38</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 66